



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1130 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 26.800 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN  
RATUS METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4682/-076 tanggal 20 Desember 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 26.800 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Marina, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bupati Kepulauan Seribu;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Bupati Kepulauan Seribu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 26.800 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm 26.800 \text{ M}^2$  (LEBIH KURANG DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

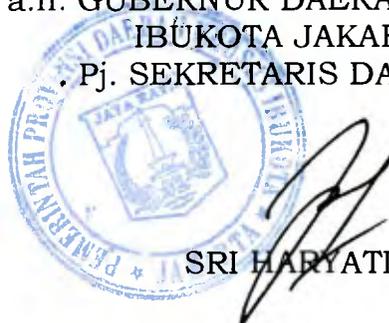
**KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 26.800 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Bupati Kepulauan Seribu melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH.



SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR **1130**  
 TAHUN **2020**  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
 SELUAS ± 26800 M2 (DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS METER PERSEGI)  
 PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
 PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**A. TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	80000000000000	01011105005	000011	26800	M2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Marina Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara	492.450.000.000,00	-

